

PLN Batalan Program Kompor Listrik, Rudi Hartono: Sebelumnya Tidak Ada Kajian

Updates. - JEJAKPOLITISI.COM

Sep 27, 2022 - 06:36



Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun

JAKARTA - PT [PLN](#) (Persero) akhirnya membatalkan program pengalihan kompor [LPG](#) 3 kg ke kompor listrik, usai menuai polemik di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI [DPR RI Rudi Hartono Bangun](#) menilai [PLN](#) tidak melakukan kajian dan penelitian

ketika akan membagikan kompor listrik gratis ke masyarakat.

“Percobaan yang dilakukan [PLN](#) dengan membagikan kompor listrik gratis ke masyarakat, tetapi kompor listrik yang dibagi kapasitas dayanya untuk listrik di atas 1500 watt. Artinya meteran listrik masyarakat yang dayanya hanya 900 watt tidak akan mampu untuk mengoperasikan kompor listrik yang dibagikan gratis tersebut. Tidak ada kajian, penelitian, dan studi banding, sehingga menuai polemik (di masyarakat) dan kesannya (program) asal-asalan,” tegas Rudi kepada **Media**, via sambungan WhatsApp, Selasa (27/9/2022).

Politisi Partai [NasDem](#) itu pun mempertanyakan, kenapa [PLN](#) tidak membagikan kompor listrik dengan kapasitas listrik yang dimiliki masyarakat. “Kenapa tidak kompor listrik yang kapasitasnya 400 watt? Sehingga cocok untuk (tegangan) listrik masyarakat di desa. Tidak sinkron kompor listrik yang dibagikan [PLN](#) untuk warga desa dengan tegangan listrik warga yang hanya 900 watt. Dan jika warga diminta untuk naikkan daya lagi ke 2000 watt, tentu dikenakan biaya yang tidak sedikit. Tentu warga juga keberatan,” analisa Rudi.

Di sisi lain, Rudi mengakui tujuan program kompor listrik tersebut yang diharapkan dapat menyerap surplus listrik yang diproduksi [PLN](#) sebenarnya sangat tepat. Namun karena program ini dibatalkan, Rudi pun meminta direksi [PLN](#) harus bisa mengatasi surplus listrik tersebut. “Ya direksi [PLN](#) harus memasarkan surplus energinya ke sektor industri dan manufaktur. Dan direksi [PLN](#) harus banyak inovasi dan kreatif. Untuk apa aset energi listriknya melimpah, tapi *enggak* bisa dijual,” kritik legislator daerah pemilihan (dapil) [Sumatera Utara](#) III itu.

Sebelumnya, Direktur Utama [PLN](#) Darmawan Prasodjo [PLN](#) mengatakan, [PLN](#) membatalkan program pengalihan ke kompor listrik. [PLN](#) juga memastikan tarif listrik tidak naik. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ([ESDM](#)). “Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” ucap Darmawan, Selasa (27/9/2022). (sf)